



BERKALA PERIKANAN  
TERUBUK

Journal homepage: <https://terubuk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JT>  
ISSN Printed: 0126-4265  
ISSN Online: 2654-2714

## STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF RANSANG BARAT FISHERMAN COMMUNITY WITH THE PERSPECTIVE OF HDI INDICATORS

## STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT NELAYAN RANSANG BARAT BERPERSPEKTIF INDIKATOR IPM

*Tomí Ramadóna\*, Darwis*

*\*Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Jl. Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, Indonesia*

### INFORMASI ARTIKEL

*Diterima: 28 Oktober 2022*

*Distujui: 25 November 2022*

#### *Keywords:*

AHP, Coastal, Fisherman, HDI, Policy

### ABSTRACT

The development program aims to improve the quality of life of the community. One form of measuring the quality of human resources is the Human Development Index (HDI). This indicator also applies to fishermen communities. HDI is an important indicator to measure and plan the success of developing the quality of life of fishermen communities. This research was conducted from May to August 2021 in Ransang Barat District. This study uses a quantitative descriptive approach with a survey method. Sampling was carried out by accident methode on 30 fishermen scattered on the coast of Ransang Barat District. The data analysis technique in determining the HDI value is the calculation based on the geometric mean of the health index, knowledge index and expenditure index which refers to the UNDP calculation model. Based on the results of the analysis, the HDI value of the Ransang Barat fishermen community was 57.07. These values can be broken down based on 3 aspects that make up the HDI as follows: Health index 71.67; Education index 66.83; and the Expenditure index of 39.78. The value of the health index is indicated by the child mortality rate which is influenced by public access to health facilities. The low education index is caused by the limited economic and physical access of the community to basic education facilities. The expenditure index value is influenced by low productivity which causes low income and affects the limited ability of the community to access the necessities of life. Based on the AHP analysis, it is found that the fishing community development policies with an HDI perspective are prioritized to increase access to capital and fishery production inputs (priority 1) and the development of alternative livelihoods (priority 2).

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat nelayan yang mendiami kawasan pesisir secara umum berada dalam kondisi kurang sejahtera. Komunitas ini tergolong masyarakat miskin (Hapsari et al., 2019). Produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah, pendidikan yang terbatas, keterampilan dan pengetahuan yang terbatas serta permodalan yang lemah merupakan masalah yang menyebabkan kemiskinan nelayan (Panjaitan & Panjaitan, 2020). Minimnya akses dan aset nelayan menyebabkan kesejahteraan mereka menurun (Ogul et al., 2018). Produksi perikanan belum mensejahterakan nelayan. Keterbatasan internal nelayan dan faktor

eksternal seperti jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif bagi nelayan sebagai produsen menyebabkan kemiskinan perikanan (Onte et al., 2018). Masalah tersebut berdampak pada produktivitas nelayan dan juga pendapatannya (Rafiy et al., 2015).

Kecamatan Ransang Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Daerah ini dikenal memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi dan ditunjukkan dengan produksi perikanan yang besar baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Potensi sumberdaya perikanan yang besar ini tidak serta merta menjadikan masyarakat nelayan di Ransang Barat hidup dalam kondisi sejahtera. Hal ini juga didukung oleh informasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ransang Barat pada tahun 2011 masih tergolong rendah yaitu terdapat 34.91 persen rumah tangga miskin dan secara umum perkembangannya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti Pada tahun 2021 berada pada angka 25,68 persen (BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021).

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama program pembangunan dan indikator ini tercipta melalui peningkatan pendapatan. Rumah tangga nelayan perlu meningkatkan kesejahteraannya dengan meningkatkan pendapatannya di bidang perikanan maupun non perikanan. Masalah kesejahteraan pada masyarakat nelayan yang disebabkan oleh keterbatasannya akan membuat rendahnya taraf hidup nelayan sehingga berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alternatif penting untuk pembangunan yang terukur. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana produktivitas suatu wilayah terkait dengan IPM-nya khususnya pada masyarakat nelayan. Produksi perikanan merupakan salah satu variabel yang menciptakan pendapatan nelayan. Kemudian pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder rumah tangga nelayan. Dengan pendapatan tersebut, sumber daya manusia dalam rumah tangga nelayan dapat menjaga kesehatannya dan mengenyam pendidikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

IPM masyarakat nelayan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat nelayan. IPM digunakan untuk melihat perkembangan masyarakat perikanan dalam jangka panjang. Ada hubungan antara IPM dan produksi (produk domestik bruto) yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi (Wulandari et al., 2019). Dengan demikian, perlu disusun kebijakan pengembangan masyarakat nelayan berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia agar pembangunan berikutnya dapat lebih terarah sehingga efektif dan efisien.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode survey di Kecamatan Ransang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Agustus 2021. Metode survei adalah pengumpulan data yang informasinya dapat diperoleh langsung dari orang-orang yang dipilih sebagai sampel atau responden (Showkat & Parveen, 2017). Metode survei merupakan salah satu metodologi dalam kajian sosial ekonomi perikanan (Panello et al., 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan melalui 30 responden dan 7 orang informan kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi dan literatur karya ilmiah yang relevan. Responden adalah nelayan yang berada di Ransang Barat. Informan kunci terdiri dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua kelompok nelayan Ransang, Pelaku usaha perikanan, BPS Meranti, Perangkat kecamatan Ransang Barat dan Tokoh masyarakat Ransang Barat. Data primer yang dikumpulkan adalah komponen indeks IPM yang terdiri dari aspek kesehatan seperti angka harapan hidup dan angka kematian nelayan, aspek pendidikan (lama bersekolah) dan aspek ekonomi atau aspek taraf hidup (perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran).

### *Analisis Data*

Analisis data untuk menentukan IPM dihitung berdasarkan rerata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran yang mengacu pada model perhitungan United Nations Development Program (UNDP). Penelitian ini memiliki dua analisis yaitu: mengidentifikasi status pengembangan masyarakat perikanan di Kepulauan Ransang dan perbandingan status IPM masyarakat perikanan di Kecamatan Ransang Barat, Kabupaten Meranti, dan Provinsi Riau. IPM adalah mean geometrik dari indeks tiga dimensi UNDP (UNDP, 2020):

Indeks Kesehatan:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}} \dots\dots\dots (1)$$

## Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \dots\dots\dots (2)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \dots\dots\dots (3)$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots (4)$$

## Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{I_n(\text{pengeluaran}) - I_n(\text{pengeluaran}_{min})}{I_n(\text{pengeluaran}_{maks}) - I_n(\text{pengeluaran}_{min})} \dots\dots\dots (5)$$

## Perhitungan IPM

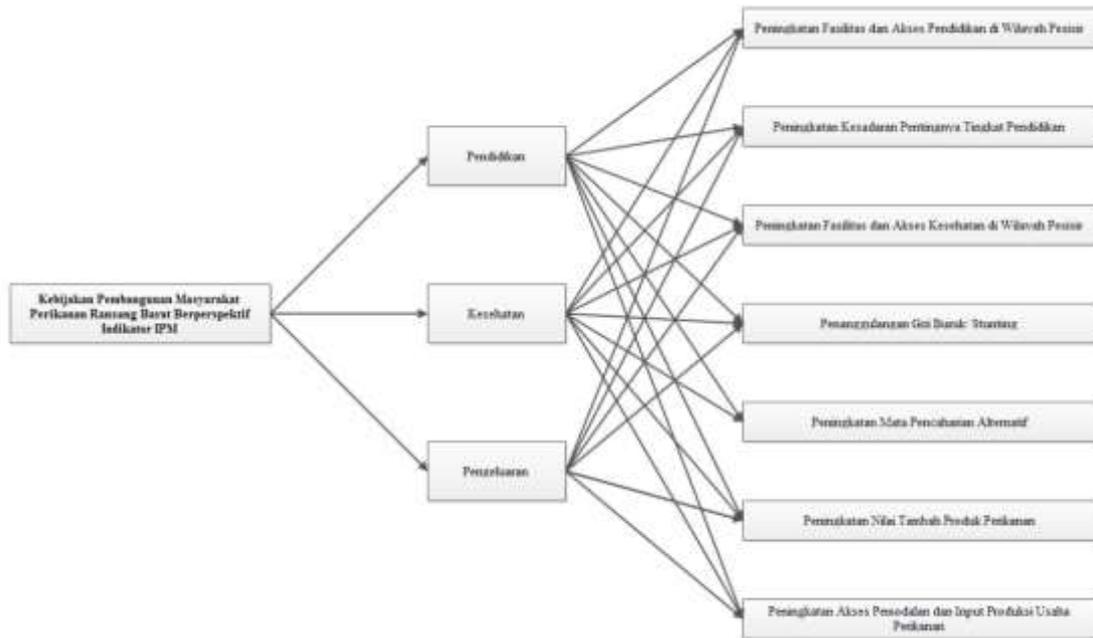
$$HDI = (I_{Health} \cdot I_{Education} \cdot I_{Income})^{1/3} \dots\dots\dots (6)$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan penilaian kualitas sumberdaya manusia dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional dan regional. Rumusan kebijakan tersebut dapat dihasilkan dengan formulasi beberapa alternatif kebijakan dengan alat analisis AHP (*Analysis Hierarchy Process*). Pengolahan data dilakukan dengan aplikasi microsoft excel dan expert choice 11.

Teknik pengerjaan AHP dimulai dari pengumpulan data melalui pengisian kuesioner dan wawancara dengan informan kunci yakni pakar atau ahli pada bidang yang dikaji. Pakar tersebut terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa, Pemuka Masyarakat, Unsur institusi lokal dan akademisi. Pandangan dan jawaban para pakar tersebut memberi gambaran tentang prioritas kebijakan dari alternatif kebijakan yang muncul sehingga kebijakan tersebut dapat mendasari rencana dan program pembangunan yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. AHP dikembangkan oleh Thomas Saaty dalam rangka pengambilan keputusan multi kriteria (Hussain et al., 2015).

Pengambilan keputusan memungkinkan beragam kriteria yang harus menjadi pertimbangan dan teknik AHP merupakan salah satu alat analisis yang memfasilitasi pengambilan keputusan dengan multi kriteria tersebut (Hussain et al., 2015). Responden dalam AHP dalam hal ini adalah pakar/informan kunci yang mewakili unsur masyarakat dan pemerintah yang berperan dalam pengambilan keputusan dan penentu kebijakan bagi masyarakat nelayan. Informan kunci akan memberikan penilaian berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Perbandingan nilai menjadi dasar penentuan prioritas alternatif kebijakan. Hal tersebut berguna untuk menentukan urutan kebijakan yang perlu direalisasikan dan diprioritaskan berdasarkan indikator IPM. Dengan demikian, hasil analisis AHP dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah operasional pengelolaan unsur-unsur yang membentuk indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Kajian ini menempuh beberapa langkah proses dalam AHP yakni penataan/ pendefinisian masalah, penyusunan hierarki berdasarkan tujuan atau maksud yang ingin diperoleh, penentuan kriteria dan alternatif (Penilaian komparatif). AHP menggunakan skala nilai perbandingan berpasangan dengan range 1 – 9 (Hussain et al., 2015).



Gambar 1. Hierarki dalam pengambilan keputusan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan perumusan IPM masyarakat nelayan didasarkan pada rumus IPM dengan model perhitungan UNDP. Langkah pertama adalah menghitung semua komponen yang membuat setiap aspek. Jadi, rumus tersebut memberikan poin indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan menggambarkan tentang harapan hidup yang didapat dari indeks kematian. Indeks pendidikan merupakan ringkasan lama sekolah dan angka melek huruf. Indeks pengeluaran diperoleh dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran perikanan. Poin indeks IPM akan dikategorikan dalam level sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Kategori sangat tinggi lebih dari 80, kategori tinggi 70-79%, kategori sedang 55-69%, dan kategori rendah kurang dari 55% (UNDP, 2020). Berdasarkan rumus IPM, IPM masyarakat nelayan Kecamatan Rangsang Barat ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. IPM Masyarakat nelayan Kecamatan Rangsang Barat

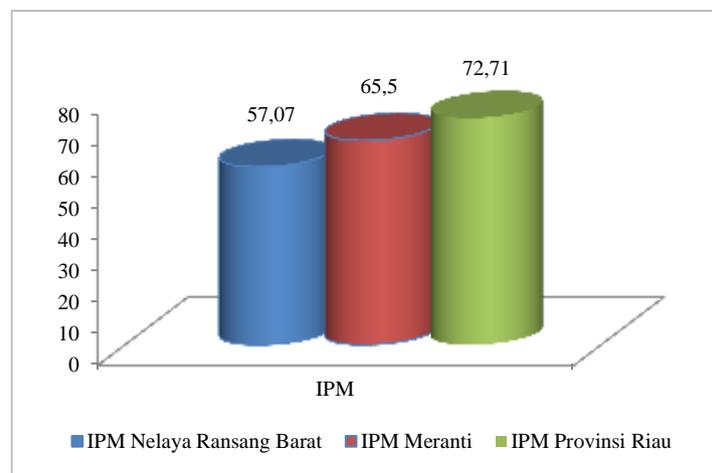
Indeks	Skor
Indek kesehatan	71,67
Indeks Pendidikan	66.88
Indeks Pengeluaran	39.78
IPM Nelayan Rangsang Barat	57.07

Berdasarkan hasil penelitian, IPM masyarakat nelayan di Kecamatan Rangsang Barat adalah 57,07 dan termasuk dalam kategori sedang. Menurut data BPS pada tahun 2021, IPM Kabupaten Meranti merupakan yang terendah di Provinsi Riau. Nelayan sebagai masyarakat dengan kesejahteraan rendah merupakan bagian dari IPM terendah tersebut. Ada beberapa penyebab rendahnya IPM khususnya pada masyarakat nelayan.

Dalam indikator kesehatan, harapan hidup masyarakat nelayan tergolong tinggi (di atas 65 tahun). Harapan hidup adalah jumlah tahun di mana seseorang diharapkan untuk hidup. Hal ini ditandai dengan angka kematian (Etikan et al 2018). Harapan hidup dipengaruhi oleh standar hidup yang rendah, fasilitas kesehatan yang buruk, kebijakan kesehatan pemerintah, jumlah penduduk yang tinggi, terorisme dan pendidikan yang rendah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kematian bayi dan peningkatan jumlah kelahiran hidup menentukan tingkat harapan hidup. Hal ini didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. Rendahnya angka harapan lahir menggambarkan bahwa negara atau daerah memiliki akses kesehatan yang rendah (Etikan et al 2018).

Pada indikator pendidikan, tingkat melek huruf masyarakat nelayan di Kepulauan Ransang berada pada kategori sedang. Skor rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat nelayan hanya mengenyam pendidikan dasar karena pendapatan yang rendah dalam rumah tangganya membatasi akses mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan menengah disebabkan oleh kemiskinan (Lestari and Sanar, 2018). Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memfasilitasi sarana pendidikan bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Berdasarkan Asmita dkk (2017), pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tidak berpengaruh terhadap IPM. Akses pendidikan lebih penting daripada program dan fasilitas pendidikan.

Indeks pendapatan merupakan indikator pembentuk IPM yang ditunjukkan oleh daya beli/paritas daya beli masyarakat. Indikator ini menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya subsektor perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga perikanan. Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan dan pengeluaran perkapita. Nilai indeks pengeluaran masyarakat nelayan tergolong rendah. Berdasarkan analisis data dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat nelayan lebih tinggi dari pendapatan nelayan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat nelayan. Kondisi ini sedikitbanyaknya juga dipengaruhi oleh kebijakan makro pemerintah dalam menghadapi tekanan pandemi. Purchasing power parity (PPP) juga dipengaruhi oleh kebijakan makroekonomi (Zayed et al 2019).



Gambar 2. Perbandingan status IPM

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan status IPM masyarakat nelayan di Kecamatan Ransang Barat, Kabupaten Meranti dan Provinsi Riau. Nilai setiap indeks IPM masyarakat perikanan di Kecamatan Ransang lebih rendah dibandingkan nilai indeks di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau. Dengan demikian, program pembangunan belum optimal dalam hal pengelolaan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan dan kegiatan produktif pembentuk pendapatan sehingga nilai IPM di Kecamatan Ransang Barat masih tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi dan fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator pembentuk IPM yang berpengaruh positif dan signifikan bagi peningkatan nilai IPM (Asmita dkk, 2017).

### ***Kebijakan Pengembangan Masyarakat Nelayan Berperspektif Indikator IPM***

Kebijakan pengembangan masyarakat nelayan berperspektif Indikator IPM didasari dari hasil status IPM dan faktor pengungkit yang diperoleh melalui hasil analisis pertama dalam kajian ini. Analisis ini dilakukan dengan mengakomodir berbagai aspek/ dimensi secara komprehensif yang berkaitan pada rencana pengembangan masyarakat secara strategis. Aspek/ kriteria yang digunakan dalam merumuskan kebijakan pengembangan masyarakat nelayan mengacu pada indeks IPM yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran.

#### **a). Indeks Pendidikan**

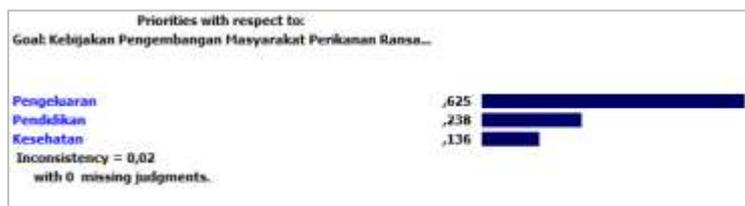
Pada metode penghitungan IPM Tahun 2020, indikator pembentuk IPM pada indeks Pendidikan ditentukan oleh lama bersekolah (BPS, 2021). Indonesia memiliki standard pendidikan dasar sebagai fasilitas wajib belajar bagi seluruh warga negara. Kebijakan pemerintah guna mensukseskan wajib belajar 9 tahun (lama bersekolah) dengan memberikan bebas biaya bagi Pendidikan dasar di sekolah negeri dan berbagai bantuan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah maupun peserta didiknya. Namun demikian, indeks Pendidikan masyarakat nelayan masih tergolong rendah. Beberapa nelayan bahkan tidak tamat SD karena memilih berhenti sekolah untuk mencari nafkah. Pendidikan yang rendah menjadi awal rendahnya produktifitas yang berpengaruh kepada pendapatan, pengeluaran untuk Kesehatan dan indeks pembangunan manusia (IPM)

### b). Indeks Kesehatan

Pengukuran indeks Kesehatan dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Menurut UNDP (2020), terdapat keterkaitan antara indikator pembentuk indeks kesehatan dengan pembentuk indeks pendidikan. Anak yang lahir di negara Norwegia dengan nilai HDI/IPM tertinggi di dunia mempunyai angka harapan hidup hingga 82 tahun dan lama bersekolah selama 18 tahun, sedangkan anak yg lahir di Negara Nigeria dengan nilai HDI terendah di dunia memiliki angka harapan hidup tidak lebih dari 60 tahun dan lama bersekolah hanya 5 tahun. Angka kematian dipengaruhi oleh rata-rata angka mortalitas bayi lahir, ibu usia dini, kemiskinan dan akses kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Dalam tataran kebijakan, Pengembangan pola gaya hidup sehat nelayan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (Metalisa et al, 2021).

### c). Indeks Pengeluaran

Kemiskinan dan PDRB dapat mempengaruhi nilai IPM dari indeks pengeluaran (Wulandari et al 2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan nelayan bersifat multidimensi (Barclay, 2013). Selain itu, kemiskinan nelayan juga dapat dilihat dari dimensi yang berbeda, yaitu: dimensi materi berupa kekurangan pangan dan lapangan pekerjaan, antara lain dimensi ketidakberdayaan psikologis, tidak mampu mengemukakan pendapat, ketergantungan, rasa malu, malu dan hina, sebagai serta dimensi modal sosial terkait kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan (Palivela et al, 2011). Hal lain yang dianggap sebagai faktor kemiskinan nelayan adalah kemiskinan alamiah. Kemiskinan semacam ini dapat membentuk proses sosialisasi berdasarkan pandangan dan budaya, nilai, dan norma maritim anak-anak nelayan dalam menghadapi masa depan. Hal lain yang dianggap sebagai faktor kemiskinan nelayan adalah kemiskinan alamiah. Kemiskinan semacam ini dapat membentuk proses sosialisasi berdasarkan pandangan dan budaya, nilai, dan norma maritim anak-anak nelayan dalam menghadapi masa depan (Wekke and Cahaya, 2013). PDRB adalah variabel control IPM karena peningkatan PDRB tidak serta merta meningkatkan nilai IPM jika tidak terjadi pemerataan pendapatan dan alokasi untuk aktifitas yang berpotensi meningkatkan IPM (Setiawan dan Hakim, 2013).



Gambar 3. Hasil pembobotan kriteria dalam perumusan Kebijakan

### *Alternatif Kebijakan Pengembangan Masyarakat nelayan Berperspektif Indikator IPM*

Upaya menghasilkan kesimpulan yang komprehensif menempuh tahapan penyusunan kerangka pemikiran yang komprehensif dari setiap tahapan analisis. Sebelum menetapkan prioritas kebijakan pengembangan masyarakat nelayan berperspektif indikator IPM, perlu dirumuskan alternatif kebijakan yakni:

1. Peningkatan Fasilitas dan Akses Pendidikan di Wilayah Pesisir
2. Peningkatan Kesadaran Pentingnya Tingkat Pendidikan
3. Peningkatan Fasilitas dan Akses Kesehatan di Wilayah Pesisir
4. Penanggulangan Gizi Buruk/ Stunting
5. Peningkatan Mata Pencaharian Alternatif
6. Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan
7. Peningkatan Akses Pemodalan dan Input Produksi Usaha Perikanan

Berdasarkan hasil analisis AHP diperoleh prioritas kebijakan dalam pengembangan masyarakat nelayan berperspektif mitigasi bencana. adapun hasil analisis ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Prioritas Kebijakan Pengembangan Masyarakat nelayan berperspektif IPM di Ransang Barat

Berdasarkan hasil analisis AHP diketahui bahwa prioritas kebijakan pertama dalam pengembangan masyarakat nelayan berprespektif IPM yakni meningkatkan akses permodalan dan input produksi. Akses permodalan merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan produktif, namun perlu didukung dengan edukasi tentang tatakelola permodalan sehingga pengembangan nilai ekonomi usaha dapat tercapai (Saiklendra, 2021). Salah satu upaya peningkatan akses permodalan yakni perluasan jaringan usaha (Irawan, 2020). Alternatif kebijakan berikutnya yakni pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat nelayan. Bentuk mata pencaharian alternatif bagi masyarakat nelayan secara umum diarahkan pada kegiatan yang masih memiliki kaitan dengan usaha perikanan (Parera et al, 2021). tersebut antara lain adalah usaha olahan berbahan ikan dan kerajinan hasil laut sebagai mata pencaharian alternatif prioritas 1 dan 2 (Septya et al, 2020). Mata pencaharian alternatif tersebut diketahui adalah kegiatan produksi hasil perikanan yang meningkatkan nilai tambah (prioritas ketiga). Salah satu bentuk menciptakan nilai tambah hasil perikanan yakni usaha pengawetan/pengasapan ikan dan pengembangan wilayah pesisir sebagai tempat wisata dengan fasilitas yang memadai (Paulangan, 2018).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat nelayan di Kecamatan Ransang Barat tergolong rendah. Berdasarkan indeks pembentuk IPM diketahui bahwa pada nilai pada indeks kesehatan dipengaruhi oleh rendahnya angka kematian bayi Sedangkan rendahnya nilai pada indeks pendidikan disebabkan oleh aksesibilitas, kendala sarana dan prasarana serta biaya atau akses ekonomi dan fisik masyarakat nelayan terhadap fasilitas pendidikan itu sendiri. Rendahnya nilai indeks pengeluaran dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas, salah satunya adalah dampak dari pandemi Covid-19. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga perbandingan nilai pendapatan dengan pengeluaran juga rendah. Berdasarkan analisis AHP maka diperoleh kebijakan pengembangan masyarakat nelayan berprespektif IPM yang menjadi prioritas adalah peningkatan akses permodalan dan input produksi perikanan (prioritas 1) dan pengembangan mata pencaharian alternatif (prioritas 2).

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan penelitian ini. serta seluruh responden dan informan di Kecamatan Ransang Barat yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan penelitian.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, Fitrawaty, and Ruslan, D.(2017). Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province. *IOSR J. Bus. Manag.* 19 (10), 27–36.
- Barclay, K. (2013). Fishing for Fairness: Poverty, Morality and Marine Resource Regulation in the Philippines. *Australian Journal Of Anthropology*, 24 (3), 354-355.
- BPS Kabupaten Kepulauan Meranti. (2021). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten kepulauan Meranti 2021.
- Etikan, I., Adebayo, A. A., Yuvali, M. (2018). Life expectancy; factors, malaria the most common disease affecting pregnant women in Africa (Nigeria and Cameroon). *Biometrics & Biostatistics International Journal* . 7 (4), 294-297.
- Hapsari, T. D., Primawati, L., Bambang, A. N., Triarso, I., & Fitri, A. D. P. (2019). Impact of Rural Fisheries Businesses Program to the Fishermen Welfare in Mangunharjo Sub District Tugu Semarang Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 246(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012041>
- Hussain, M., Ajmal, M. M., Khan, M., & Saber, H. (2015). Competitive priorities and knowledge management: An

- empirical investigation of manufacturing companies in UAE. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 26(6), 791–806. <https://doi.org/10.1108/JMTM-03-2014-0020>
- Lestari, W.W., and Sanar, V. E. (2018). Analysis Indicator of Factors Affecting Human Development Index (Ipm). *Geosfera Indones.*, 2 (1), 11-18.
- Metalisa, R., Septya, F., AN, D., & Ramadona, T. (2021). Social Condition of Fishermen Community in Sungai Apit Subdistrict Due to Social Manipulation for COVID 19 Pandemic. *Berkala Perikanan Terubuk.*, 49 (1), 721-732.
- Onte, D., Salam, A., Fachrussyah, Z. C., Science, M., & Gorontalo, U. N. (2018). Fishermen Welfare Level in Torosiaje Laut Village. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 6, 98–102.
- Palivela, H; Satyanarayana, G; Jawahar, P.J; and Neeharika, M.S. (2011). Socio-economic status of Fishermen of Lawson's bay, Visakhapatnam, India. *Ecology, Environment and Conservation*, 17 (4), 811-814.
- Panello, D., Gee, J., & Dimech, M. (2017). *Handbook for fisheries socio-economic sample survey: Principles and practice: Food AND Agriculture Organisation of the United Nation*. 1–136.
- Panjaitan, H., & Panjaitan, F. A. B. K. (2020). The Economic Welfare of Fishermen Households in Indonesia. *Research Gate*, 57(December 2020), 1–9.
- Parera, N. Y.O., Bhokaleba, B. P. P. W., and Ramadona, T. (2021). The Sustainability of Skipjack in Sikka Regency: An Analysis of Economic Dimension. *Berkala Perikanan Terubuk.*, 49 (2), 880-889 .
- Paulangan, Y. P. (2018). Identifikasi Mata Pencapaian Alternatif Masyarakat Lokal. *J. JUMABIS*, 2, 1–8.
- Rafiy, M., Tibertius, N., & Muthalib, A. A. (2015). Study of Improvement Fishermen Welfare Through Improved Productivity And Model Development In The Coastal North Konawe. *The International Journal of Engineering and Science*, 4(12), 62–67.
- Sailendra, S., Suratno, S., Tampubolon, M. (2021). UMKM, Tatakelola keuangan; Akses terhadap modal kerja; Meningkatkan dan pengembangan nilai ekonomi usaha.. *J. CAPACITAREA*, 1(2), 110–120.
- Septya, F., Ngesti, S. M. and Ramadona, T. (2020). Strategi Pengembangan Mata Pencapaian Alternatif Bagi Masyarakat Nelayan Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. *Techno-Fish*, IV (1), 38–51.
- Setiawan, M.B., Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *J. Economia*, 9 (1). 18–26.
- Showkat, N., & Parveen, H. (2017). *Quantitative Methods : Survey Quadrant-I ( e-Text ). August*.
- UNDP. (2020). The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. In *Human Development Report 2020*. <http://hdr.undp.org/en/2020-report>
- Wekke, I. S., and Cahaya, A. (2015). Fishermen Poverty and Survival Strategy: Research on Poor Households in Bone Indonesia. *Procedia Economics and Finance*, 26 (2015), 7–11.
- Wulandari, D., Narmaditya, B. S., Prayitno, P. H., Ishak, S., & Asnan, L. (2019). Human Development Index, Poverty and Gross Regional Domestic Product: Evidence from Malang, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 7(2), 146–152. <https://doi.org/10.21009/jpeb.007.2.6>